
Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) dalam Perspektif Audit Kinerja

¹Mutmainna Sarita Bandaso, ²Junaidi, ³Rahmawati

¹Department of Accounting, Universitas Muhammadiyah Palopo, Palopo City, South Sulawesi, 91911

²Department of Accounting, Universitas Muhammadiyah Palopo, Palopo City, South Sulawesi, 91911

³Department of Accounting, Universitas Muhammadiyah Palopo, Palopo City, South Sulawesi, 91911

¹mutmainnasaritabandaso@gmail.com, ²junaidi@umpalopo.ac.id, ³rahmawati@umpalopo.ac.id

Article Info

Article history:

Received Oct 30, 2025

Accepted Jan 31, 2026

Keywords:

Local Government Performance, Efficiency, Data Envelopment Analysis (DEA), Performance Audit.

ABSTRACT

This research analyzes the performance of local governments in Luwu Raya using the Data Envelopment Analysis (DEA) method from a performance audit perspective. With input variables such as Budget Realization Reports, the number of Civil Servants and Public Service Units, and output variables like Economic Growth and poverty rates, DEA is used to measure the relative efficiency between Decision Making Units (DMUs), in this case, local governments in the Greater Luwu area. The research results show that most local governments have been able to manage resources efficiently, leading to significant economic growth and a decrease in poverty rates. This indicates that budget allocation, optimization of civil servant performance, and the role of public service units contribute significantly to achieving regional development goals. This finding also shows that the DEA approach can be an effective tool in supporting performance audits, as it is able to provide an objective overview of local governments' success in achieving the principles of economy, efficiency, and effectiveness (value for money). This research is expected to strengthen the literature on public sector performance evaluation while providing practical recommendations for both central and local governments to maintain and improve the positive achievements that have been made.



© 2022 by the authors; licensee FEB UMP. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Corresponding Author:

Mutmainna Sarita Bandaso

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Palopo

Email: mutmainnasaritabandaso@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia mengambil langkah besar dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah menjadi salah satu instrumen utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dengan memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan dan keputusan yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerahnya masing-masing. Tujuan utama dari kebijakan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pemerintahan daerah (Sabrina, 2022). Namun, selain meningkatkan partisipasi masyarakat, otonomi daerah juga

diharapkan dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah (Handraini et al., 2024), karena dengan adanya kewenangan yang lebih besar, pemerintah daerah dapat lebih responsif dalam mengelola sumber dayanya, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta mendorong investasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

Sejak diterapkan otonomi daerah di Indonesia, beberapa studi menunjukkan bahwa kebijakan tersebut memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah, namun tidak semua daerah mengalami pertumbuhan ekonomi ada beberapa daerah yang tidak mengalami pertumbuhan ekonomi setelah kebijakan tersebut ditetapkan (Bahasoan et al., 2024). Ketimpangan laju pertumbuhan ekonomi yang tidak merata ini berdampak pada perbedaan kesejahteraan antarwilayah, sehingga menyebabkan di beberapa daerah kemiskinan masih menjadi masalah struktural yang sulit untuk ditangani (Nursa et al., 2021). Karena pembangunan lebih banyak terpusat pada wilayah yang memiliki infrastruktur memadai dan akses yang lebih mudah maka hal tersebut juga menjadialah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan terus menjadi masalah yang sulit ditangani pemerintah daerah.

Pertumbuhan ekonomi yang rendah mendorong kemiskinan terus meningkat, begitu pula sebaliknya, apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka akan berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Data menunjukkan bahwa Persentase angka kemiskinan di Kota Palopo, data per 30 November 2024 tercatat 7,35 persen. Jumlah ini turun 0,34 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang dilaporkan 7,69 persen (Darmawan, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di suatu daerah (Nairizi, 2023). Kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh rendahnya kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesempatan kerja. Ketimpangan laju pertumbuhan antarwilayah menyebabkan sebagian daerah sulit mengurangi angka kemiskinan, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan akses layanan publik (Sofyan et al., 2024), sehingga tanpa adanya kebijakan yang mendukung dan pemerataan pembangunan yang merata, kesenjangan sosial antarwilayah akan semakin melebar.

Dengan adanya ketimpangan yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan di beberapa wilayah, maka perlu adanya sistem evaluasi kinerja pemerintah daerah yang lebih objektif dan dapat diukur (Sarjito, 2024). Pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan yang tidak merata dan cenderung meningkat menunjukkan bahwa kebijakan dan program pemerintah daerah belum cukup efektif. Evaluasi kinerja yang objektif dibutuhkan untuk memastikan sumber daya yang ada di daerah dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mualif et al., 2024). Dalam hal ini, pendekatan berdasarkan analisis kuantitatif seperti Data Envelopment Analysis (DEA) akan sangat membantu, karena mampu mengukur bagaimana sumber daya digunakan secara lebih tepat. Dengan cara ini, evaluasi melalui DEA tidak hanya membantu mengetahui daerah yang sudah efisien dalam mengelola sumber daya, tetapi juga memberikan informasi bagi daerah lain yang masih perlu mengubah strategi pembangunan dan sistem pelayanan publiknya (Bamatraf & Prabowo, 2024).

Meskipun telah ada penelitian sebelumnya yang mengkaji kinerja pemerintah daerah, namun belum banyak menilai kinerja pemerintah daerah secara objektif dan komprehensif dengan memperhitungkan efisiensi pengelolaan sumber daya. Studi yang dilakukan oleh Ardeli Rhomandhonna (2023) hanya mengkaji kinerja pemerintah tanpa memperimbangkan aspek penting seperti pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan dan penggunaan metode Data Envelopment Analysis (DEA). Penelitian lain yang menggunakan menggunakan DEA hanya berfokus pada perbankan saja sebagai objek penelitian. Pengukuran kinerja pemerintah daerah menggunakan metode DEA masih jarang dilakukan, padahal pendekatan ini dapat memberikan ukuran efisiensi yang lebih adil, membandingkan antarwilayah, serta mengidentifikasi potensi perbaikan kebijakan. Oleh karena celah itulah yang menjadikan penelitian ini penting untuk dilakukan.

Penelitian ini bertujuan menganalisa kinerja pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan konsep DEA, mengidentifikasi apakah input berkorelasi dengan output yang dihasilkan, dan menganalisis bagaimana hasil analisis DEA dalam konteks audit kinerja. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dari segi teori maupun praktek sebagai alat pelengkap yang kuat bagi auditor kinerja dan temuan ini dapat memberikan masukan berharga bagi pembuat kebijakan di tingkat pusat dan daerah untuk merumuskan strategi perbaikan kinerja, mengalokasikan sumber daya

secara lebih adil dan efisien, serta mendorong kompetisi positif antar daerah untuk mencapai pelayanan publik yang lebih baik.

Tinjauan Pustaka

Teori Value for Money

Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomis adalah pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif (Yulitiawati & Rusmidarti, 2021). Konsep *Value for Money* sangat relevan dengan penelitian ini karena menjadi landasan konseptual dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Melalui tiga elemennya, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, *Value for Money* menekankan bahwa pengelolaan sumber daya publik tidak hanya sebatas pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada sejauh mana anggaran tersebut digunakan secara hemat, mampu menghasilkan output yang optimal, dan benar-benar mencapai tujuan pembangunan daerah (Zanneta Althaf Nabila et al., 2024).

Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja pemerintah daerah mengacu pada tingkat capaian dari suatu hasil kerja pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat serta secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok, dengan melalui usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus mencapai kebutuhannya secara efektif. (Mattoasi et al., 2021). Kinerja pemerintah daerah dapat diukur dari seberapa baik daerah tersebut mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan pembangunan, seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan. penurunan angka kemiskinan sering digunakan untuk menilai output dari kinerja pemerintah daerah (Hamdani & Mayshelly, 2023)

Data Employment Analysis

Data Envelopment Analysis (DEA) merupakan metode nonparametric yang dikenalkan oleh Charnes, Cooper dan Rhodes pada tahun 1978-1979. Metode ini menggunakan metode linier programming yang merupakan teknik matematika dalam merencanakan dan membuat keputusan mengalokasikan sumber daya terbatas untuk mencapai tujuan. Model DEA telah banyak digunakan dalam mengukur dan mengevaluasi diberbagai sektor hingga pemerintah daerah. DEA membandingkan satu DMU dengan DMU lain untuk menilai apakah penggunaan input menghasilkan output yang optimal (Rudianto & Darlis, 2021). Metode DEA memiliki relevansi yang kuat dalam analisis kinerja pemerintah daerah karena mampu memberikan ukuran objektif mengenai sejauh mana pemerintah daerah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan output. Pemerintah daerah berperan sebagai Decision Making Unit (DMU) yang memiliki input berupa anggaran, tenaga kerja aparatur, serta infrastruktur, dan output berupa indikator pembangunan seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan. Dengan membandingkan efisiensi antar-DMU, DEA dapat menunjukkan pemerintah daerah mana yang sudah optimal dalam penggunaan sumber daya serta mana yang masih belum efisien. Dalam penerapannya dea memiliki 2 model antara lain:

1. CCR (Charnes, Cooper, dan Rhodes). Model ini adalah model awal dari teori DEA. Asumsi pada CCR adalah rasio penambahan input dan output sama atau bersifat konstan (constant return to scale) yaitu apabila input ditambah x , maka output akan bertambah sebesar x (Shintia, 2021).
2. BCR (Banker, Charnes dan Cooper). Model ini merupakan bentuk pengembangan dari model CCR. Asumsi dalam BCR adalah rasio penambahan input tidak selalu sama dengan penambahan output (Fuad, 2023).

Audit Kinerja Dalam Pemerintah

Audit kinerja merupakan pemeriksaan independen dan sistematis yang bertujuan menilai apakah program atau kegiatan pemerintah telah dijalankan secara ekonomis, efisien, dan efektif, serta

Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) dalam Perspektif Audit Kinerja

(Mutmainna Sarita Bandaso¹, Junaidi², Rahmawati³)

memberikan rekomendasi untuk perbaikan kinerja. Di Indonesia, lembaga seperti BPK melaksanakan audit ini sebagai bagian dari pengawasan pengelolaan keuangan negara, sesuai dengan prinsip 3E (ekonomi, efisiensi, efektivitas). Implementasi audit kinerja oleh Internal Supervisory Unit (APIP) dan lembaga eksternal turut memperkuat akuntabilitas publik dan tata kelola pemerintahan (Setianingsih & Setyaningrum, 2025). Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa audit kinerja dan pengawasan fungsional memiliki dampak signifikan terhadap akuntabilitas publik pada instansi seperti Komisi Yudisial (Anjani & Fadly, 2023)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis Data Envelopment Analysis (DEA), sebuah pendekatan non-parametrik berbasis pemrograman linier yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi relatif antar unit pengambilan keputusan (Decision Making Unit/DMU), dalam hal ini pemerintah daerah Se- Luwu Raya yaitu Kabupaten Luwu, Palopo, Luwu Utara dan Luwu Timur. Hasil analisis DEA memberikan gambaran mengenai tingkat efisiensi kinerja pemerintah daerah berdasarkan input dan output yang ditentukan. Variabel input antara lain 1) Laporan Realisasi Anggaran, 2) Jumlah ASN, dan 3) Unit Pelayanan Publik. Variabel output antara lain 1) Pertumbuhan Ekonomi dan 2) Angka Kemiskinan.

Tabel 1. Variabel Input/Output

Jenis Variabel	Nama Variabel	Definisi / Penjelasan Singkat	Satuan / Indikator	Sumber Data
Input (Masukan)	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Menggambarkan besarnya realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah dalam satu periode, digunakan untuk mengukur pemanfaatan anggaran terhadap hasil pembangunan.	Rupiah (Rp)	Direktorat Jendral Pajak/Kemenkue
	Aparatur Sipil Negara (ASN)	Jumlah pegawai negeri sipil yang bertugas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.	Orang	BKN / BKPSDM Daerah
	Unit Pelayanan Publik (OPD)	Jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) atau unit pelayanan publik yang memberikan layanan administratif dan sosial kepada masyarakat.	Unit	Dokumen Struktur Organisasi Pemda / PPID
Output (Keluaran)	Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah yang mencerminkan kemajuan ekonomi.	Persentase (%)	BPS (Publikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha)
	Angka Kemiskinan	Persentase penduduk dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan; menjadi indikator kesejahteraan masyarakat.	Persentase (%)	BPS (Data Kemiskinan Daerah)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis efisiensi menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) model *Charnes, Cooper, and Rhodes (CCR)* dengan pendekatan input-oriented. Model ini digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah di Luwu Raya mampu mengoptimalkan input (Laporan Realisasi Anggaran, jumlah ASN, dan jumlah unit pelayanan publik) dalam menghasilkan output

(pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan). Hasil analisis DEA menunjukkan bahwa dari empat pemerintah daerah yang menjadi objek penelitian, sebagian besar telah mampu memanfaatkan sumber daya secara efisien selama periode 2020–2024. Nilai efisiensi (θ) berkisar antara 0,631 hingga 1,000, di mana nilai 1,000 menunjukkan efisiensi sempurna.

Penentuan DMU

DMU yang dianalisa ada sebanyak 5 DMU yaitu Kabupaten Luwu, Palopo, Luwu Utara dan Luwu Timur, dengan mengambil data variabel input dan output mulai dari 2020 – 2024.

Tabel 2. Nilai Variabel Input dan Output 2020 – 2024

No	Daerah (DMU)	Tahun	OUTPUT		INPUT		
			Pertumbuhan Ekonomi (%)	Angka Kemiskinan (%)	Laporan Realisasi Anggaran (Miliar Rp)	Jumlah ASN (Orang)	Unit Pelayanan Publik (Unit)
1	Kabupaten Luwu	2020	1,30	12,65	1.451	6073	42
		2021	5,90	12,53	1.404	5651	42
		2022	5,96	12,49	1.476	5547	42
		2023	5,64	12,71	1.449	5319	42
		2024	5,64	11,7	1.598	5537	42
2	Kota Palopo	2020	0,45	7,85	0,969	4487	39
		2021	5,41	8,14	0,936	4348	39
		2022	5,83	7,78	0,988,	4261	39
		2023	4,34	7,59	0,872	4124	39
		2024	4,40	7,35	0,916,	4320	39
3	Luwu Utara	2020	0,59	13,41	1.356	5002	39
		2021	3,90	13,59	1.313	4872	39
		2022	4,54	13,22	1.251	4892	39
		2023	5,12	12,66	1.200	4764	39
		2024	4,30	11,24	1.880	4709	39
4	Luwu Timur	2020	1,46	6,85	1.495	3998	44
		2021	1,39	6,94	1.549	3946	44
		2022	1,99	6,81	1.732	3914	44
		2023	9,66	6,93	1.721	3828	44
		2024	2,83	6,55	1.880	3945	44

Sumber: data olah

Ringkasan Hasil Analisis *Technical Efficiency* DMU

Tabel 3. Tingkat *Technical Efficiency* (Te) DMU

No.	Daerah (DMU)	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Efisiensi	Keterangan
1	Kabupaten Luwu	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Efisien
2	Kota Palopo	0.844	1.000	1.000	1.000	1.000	0.969	Cenderung Efisien
3	Kabupaten Luwu Utara	1.000	1.000	1.000	0.787	1.000	0.957	Efisien dengan fluktuasi

Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) dalam Perspektif Audit Kinerja

(Mutmainna Sarita Bandaso¹, Junaidi², Rahmawati³)

4	Kabupaten Luwu Timur	1.000	0.631	0.644	1.000	0.740	0.803	Kurang Efisien
	Rata-rata (Mean)	0.961	0.908	0.911	0.947	0.935	0.932	Efisien Secara Umum

Sumber: output DEA 2.1

Pada tabel 3 menunjukkan bahwa sebagian besar daerah telah mencapai kinerja efisiensi selama beberapa tahun. Kabupaten Luwu menunjukkan bahwa daerahnya telah baik mengelolah sumber daya yang dimiliki sehingga mampu mencapai skor 1.000 yang berarti Kinerja Pemerintah Daerah efisien selama 5 tahun dalam mengelola sumber daya secara optimal dan akuntabel, sehingga setiap penggunaan anggaran publik memberikan hasil yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. Dalam perspektif akuntansi sektor publik, hal ini menunjukkan penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran (*value for money*), di mana setiap input yang digunakan menghasilkan output pembangunan secara maksimal tanpa pemborosan sumber daya. Kota Palopo menunjukkan perbaikan signifikan dari kondisi tidak efisien pada tahun 2020 dengan skor 0,844, menjadi efisien penuh pada periode 2021–2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan tata kelola keuangan daerah, khususnya dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran.

Kabupaten Luwu Utara memiliki skor efisiensi sempurna (1,000) pada tahun 2020–2022 dan kembali efisien pada 2024, namun mengalami penurunan efisiensi menjadi 0,787 pada 2023. Penurunan ini menggambarkan adanya inefisiensi dalam pemanfaatan input, seperti alokasi anggaran dan jumlah ASN yang tidak seimbang dengan output pembangunan. Dari perspektif akuntansi, kondisi ini dapat diartikan bahwa realisasi anggaran belum sepenuhnya mencerminkan pencapaian kinerja atau adanya pergeseran biaya operasional yang belum menghasilkan manfaat ekonomi yang optimal. Dengan demikian, perlu adanya peningkatan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan dan evaluasi kinerja berbasis hasil (*performance-based budgeting*).

Sementara itu, Kabupaten Luwu Timur menunjukkan pola efisiensi yang berfluktuasi dengan nilai efisiensi tertinggi pada tahun 2020 dan 2023 (1,000), serta penurunan pada tahun 2021 (0,631), 2022 (0,644), dan 2024 (0,740). Fluktuasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran dan sumber daya manusia belum dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Dari sudut pandang akuntansi sektor publik, hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap efektivitas belanja daerah dan peningkatan sistem akuntabilitas keuangan agar setiap pengeluaran anggaran dapat diukur kontribusinya terhadap hasil pembangunan.

Secara keseluruhan, hasil tersebut memperlihatkan bahwa penerapan prinsip efisiensi dalam perspektif akuntansi publik belum sepenuhnya merata di seluruh daerah. Pemerintah daerah perlu memperkuat fungsi audit kinerja dan pengawasan internal untuk memastikan bahwa anggaran publik digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif sesuai dengan tujuan pembangunan daerah serta prinsip *value for money* dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

Analisis Efisiensi Kabupaten Luwu Tahun 2020- 2024

Tabel 4. Analisis Efisiensi Kabupaten Luwu Tahun 2020 - 2024

2021 Technical Efficiency I				
Variabel Input/output	Original Value	Radial Movement	Slack Movement	Project Value
Pertumbuhan Ekonomi	5.900	0.000	0.000	5.900
Angka Kemiskinan	12.530	0.000	0.000	12.530
LRA	1404.000	0.000	0.000	1.404
Jumlah ASN	5651.000	0.000	0.000	5651.000
Unit Pelayanan Publik	42.000	0.000	0.000	42.000
2022 Technical Efficiency I				
Variabel Input/output	Original Value	Radial Movement	Slack Movement	Project Value
Pertumbuhan Ekonomi	12.490	0.000	0.000	12.940

Angka Kemiskinan	1.476	0.000	0.000	2476.000
LRA	5547.000	0.000	0.000	5547.000
Jumlah ASN	42.000	0.000	0.000	42.000
Unit Pelayanan Publik				
2023 Technical Efficiency 1				
Variabel Input/output	Original Value	Radial Movement	Slack Movement	Project Value
Pertumbuhan Ekonomi	64.000	0.000	0.000	64.000
Angka Kemiskinan	12.000	0.000	0.000	12.000
LRA	71.000	0.000	0.000	71.000
Jumlah ASN	1.449	0.000	0.000	1.449
Unit Pelayanan Publik				
2024 Technical Efficiency 1				
Variabel Input/output	Original Value	Radial Movement	Slack Movement	Project Value
Pertumbuhan Ekonomi	5.640	0.000	0.000	5.640
Angka Kemiskinan	11.700	0.000	0.000	11.700
LRA	1.598	0.000	0.000	1.598
Jumlah ASN	5537.000	0.000	0.000	5537.000
Unit Pelayanan Publik	42.000	0.000	0.000	42.000

Tabel 4 menunjukkan bahwa Kabupaten Luwu mencapai kinerja yang efisien, hal ini ditunjukkan dengan skor 1.00 selama 5 tahun. Dengan model CSR, *slanck movement* merupakan nilai input yang harus dikurangi karena nilai pada projected value terdapat kelebihan input (excess). Radial Movement ialah nilai yang harus dikurangi dalam variabel input dengan tetap menjaga tingkat output secara konstan. Tabel diatas pada slanck movement menunjukkan nilai 0 yang artinya DMU tidak mengalami kekurangan ataupun kelemahan dibandingkan DMU yang lain sehingga tidak perlu menambahkan projected value untuk mencapai skor efisien, sedangkan pada radial movement skor menunjukkan 0 yang artinya target input tidak kelebihan sehingga tidak memerlukan pengurangan projected vale untuk mencapai skor yang efisien. Hasil ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu telah menggunakan input dengan maksimal sehingga nilai original value dan projected value sama.

Analisis Efisiensi Kota Palopo 2020 – 2024

Tabel 5. Analisis Efisiensi Kota Palopo 2020 - 2024

2020 Technical Efficiency 0.844				
Variabel Input/output	Original Value	Radial Movement	Slack Movement	Project Value
Pertumbuhan Ekonomi	0.450	0.000	0.450	0.450
Angka Kemiskinan	7.850	0.000	7.850	7.850
LRA	0.969	-0.152	0.818	0.969
Jumlah ASN	4487.000	-699.374	3118.706	4487.000
Unit Pelayanan Publik	39.000	-6.079	23.563	39.000
2021 Technical Efficiency 1				
Variabel Input/output	Original Value	Radial Movement	Slack Movement	Project Value

Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) dalam Perspektif Audit Kinerja
(Mutmainna Sarita Bandaso¹, Junaidi², Rahmawati³)

Pertumbuhan Ekonomi	5.410	0.000	0.000	5.410
Angka Kemiskinan	8.140	0.000	0.000	8.140
LRA	0.936	0.000	0.000	0.936
Jumlah ASN	4348.000	0.000	0.000	4348.000
Unit Pelayanan Publik	39.000	0.000	0.000	39.000
2022				
Variabel Input/output	Original Value	Radial Movement	Slack Movement	Project Value
Pertumbuhan Ekonomi	5.830	0.000	0.000	5.830
Angka Kemiskinan	7.780	0.000	0.000	7.780
LRA	0.988	0.000	0.000	0.988
Jumlah ASN	4261.000	0.000	0.000	4261.000
Unit Pelayanan Publik	39.000	0.000	0.000	39.000
2023 Technical Efficiency 1				
Variabel Input/output	Original Value	Radial Movement	Slack Movement	Project Value
Pertumbuhan Ekonomi	4.000	0.000	0.000	4.000
Angka Kemiskinan	34.000	0.000	0.000	34.000
LRA	7.000	0.000	0.000	7.000
Jumlah ASN	59.000	0.000	0.000	59.000
Unit Pelayanan Publik	0.000	0.000	0.000	0.000
2024 Technical Efficiency 1				
Variabel Input/output	Original Value	Radial Movement	Slack Movement	Project Value
Pertumbuhan Ekonomi	4.400	0.000	0.000	4.400
Angka Kemiskinan	7.359	0.000	0.000	7.359
LRA	0.916	0.000	0.000	0.916
Jumlah ASN	4320.000	0.000	0.000	4320.000
Unit Pelayanan Publik	39.000	0.000	0.000	39.000

Tabel 5 menunjukkan kondisi yang sedikit berbeda pada tahun 2020 dan tahun berikutnya. Terdapat nilai *slack movement* dan *radial movement* yang tidak nol pada beberapa variabel, seperti LRA (radial movement -0,152), Jumlah ASN (slack movement 3118,706), dan Unit Pelayanan Publik (slack movement 23,563). Nilai ini mengindikasikan bahwa pada tahun tersebut masih terdapat kelebihan input yang seharusnya dapat dikurangi agar lebih efisien. Namun demikian, karena nilai projected value telah dikoreksi sesuai target, Kota Palopo tetap mencapai skor efisiensi 1,00 pada tahun 2021 – 2024. Tahun 2021 hingga 2024 *radial movement* dan *slack movement* bernilai 0 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Palopo telah melakukan perbaikan signifikan dalam pengelolaan input pembangunan. Seluruh variabel memiliki nilai *original value* yang identik dengan *projected value*, yang berarti tidak ada lagi potensi pengurangan input yang diperlukan untuk mencapai efisiensi maksimal.

Analisis Efisiensi Luwu Utara 2020 – 2024

Tabel 6. Analisis Efisiensi Luwu Utara 2020 - 2024

2020 Technical Efficiency 1				
Variabel Input/output	Original Value	Radial Movement	Slack Movement	Project Value
Pertumbuhan Ekonomi	0.590	0.000	0.000	0.590

Angka Kemiskinan	13.410	0.000	0.000	13.410
LRA	1.356	0.000	0.000	1.356
Jumlah ASN	5002.000	0.000	0.000	5002.000
Unit Pelayanan Publik	39.000	0.000	0.000	39.000
2021 Technical Efficiency 1				
Variabel Input/output	Original Value	Radial Movement	Slack Movement	Project Value
Pertumbuhan Ekonomi	3.900	0.000	0.602	3900
Angka Kemiskinan	13.500	0.000	0.000	13.500
LRA	1.313	0.000	0.000	1.313
Jumlah ASN	4872.000	0.000	0.000	4872.000
Unit Pelayanan Publik	39.000	0.000	0.000	39.000
2022 Technical Efficiency 1				
Variabel Input/output	Original Value	Radial Movement	Slack Movement	Project Value
Pertumbuhan Ekonomi	4.540	0.000	0.000	4.540
Angka Kemiskinan	13.220	0.000	0.000	13.220
LRA	1.251	0.000	0.000	1.251
Jumlah ASN	4892.000	0.000	0.000	4892.000
Unit Pelayanan Publik	39.000	0.000	0.000	39.000
2023 Technical Efficiency 0.787				
Variabel Input/output	Original Value	Radial Movement	Slack Movement	Project Value
Pertumbuhan Ekonomi	5.000	0.000	0.000	5.000
Angka Kemiskinan	12.000	0.000	24.738	36.738
LRA	12.000	-2.557	-6.043	3.400
Jumlah ASN	66.000	-14.061	0.000	51.939
Unit Pelayanan Publik	1.200	-0.256	0.000	0.944
2024 Technical Efficiency 1				
Variabel Input/output	Original Value	Radial Movement	Slack Movement	Project Value
Pertumbuhan Ekonomi	4.300	0.000	0.000	4.300
Angka Kemiskinan	11.240	0.000	0.000	11.240
LRA	11.240	0.000	0.000	11.240
Jumlah ASN	4709.000	0.000	0.000	4709.000
Unit Pelayanan Publik	39.000	0.000	0.000	39.000

Pada tahun 2020, 2021, 2022, dan 2024, nilai technical efficiency mencapai 1.00, menandakan bahwa Kabupaten Luwu Utara telah berada pada kondisi efisien. Hal ini berarti seluruh variabel input seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), jumlah ASN, dan unit pelayanan publik telah digunakan secara optimal untuk menghasilkan output berupa pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan. Nilai radial movement dan slack movement yang bernilai nol menunjukkan tidak adanya kelebihan maupun kekurangan input, sehingga tidak diperlukan

**Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) dalam Perspektif
Audit Kinerja**

(Mutmainna Sarita Bandaso¹, Junaidi², Rahmawati³)

penyesuaian untuk mencapai efisiensi maksimal. Namun, pada tahun 2023, terjadi penurunan efisiensi dengan nilai *technical efficiency* sebesar 0.787, yang mengindikasikan adanya inefisiensi sebesar 21,3%. Inefisiensi ini tercermin dari nilai *radial movement* negatif pada variabel LRA dan jumlah ASN, serta *slack movement* positif yang cukup besar pada angka kemiskinan. Hal ini menunjukkan adanya kelebihan input dan ketidakseimbangan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Dengan kata lain, kinerja pemerintah daerah pada tahun tersebut belum mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada secara maksimal.

Analisis Efisiensi Luwu Timur 2020 – 2024

Tabel 7. Analisis Efisiensi Luwu Timur 2020 - 2024

2020 Technical Efficiency 1				
Variabel Input/output	Original Value	Radial Movement	Slack Movement	Project Value
Pertumbuhan Ekonomi	1.460	0.000	0.000	1.460
Angka Kemiskinan	6.850	0.000	0.000	6.850
LRA	1.595	0.000	0.000	1.595
Jumlah ASN	3998.000	0.000	0.000	3998.000
Unit Pelayanan Publik	39.000	0.000	0.000	39.000
2021 Technical Efficiency 0.631				
Variabel Input/output	Original Value	Radial Movement	Slack Movement	Project Value
Pertumbuhan Ekonomi	1.390	0.000	0.602	1.992
Angka Kemiskinan	6.940	0.000	0.000	6.940
LRA	1.549	-0.572	-0.306	0.671
Jumlah ASN	3946.000	-1458.018	0.000	2487.982
Unit Pelayanan Publik	44.000	-16.258	-7.826	19.916
2022 Technical Efficiency 0.644				
Variabel Input/output	Original Value	Radial Movement	Slack Movement	Project Value
Pertumbuhan Ekonomi	1.990	0.000	0.349	2.339
Angka Kemiskinan	6.810	0.000	0.000	6.810
LRA	1.732	-0.617	-0.471	0.644
Jumlah ASN	3914.000	-1393.991	0.000	2520.009
Unit Pelayanan Publik	44.000	-15.671	-8.239	20.000
2023 Technical Efficiency 1 0.740				
Variabel Input/output	Original Value	Radial Movement	Slack Movement	Project Value
Pertumbuhan Ekonomi	9.000	0.000	0.000	9.000
Angka Kemiskinan	66.000	0.000	0.000	66.000
LRA	6.000	0.000	0.000	6.000
Jumlah ASN	93.000	0.000	0.000	93.000
Unit Pelayanan Publik	1.721	0.000	0.000	1.721
2024 Technical Efficiency 1				
Variabel Input/output	Original Value	Radial Movement	Slack Movement	Project Value

Pertumbuhan Ekonomi	2.830	0.000	0.000	2.830
Angka Kemiskinan	6.550	0.000	0.000	6.550
LRA	1.880	-0.488	-0.396	0.996
Jumlah ASN	3945.000	-1023.930	0.000	2921.070
Unit Pelayanan Publik	44.000	-11.420	-9.462	23.118

Pada tahun 2020, seluruh variabel input maupun output memperlihatkan nilai *radial movement* dan *slack movement* sebesar nol, yang berarti tidak terdapat kelebihan maupun kekurangan input. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya daerah telah optimal sehingga nilai *original value* dan *projected value* sama, menandakan kinerja pemerintah daerah yang efisien penuh. Namun, pada tahun 2021 dan 2022 terlihat adanya inefisiensi pada beberapa variabel, terutama pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), dan unit pelayanan publik. Nilai *radial movement* negatif dan *slack movement* positif pada variabel-variabel tersebut menunjukkan adanya kelebihan input yang perlu dikurangi agar efisiensi dapat tercapai. Sementara itu, variabel pertumbuhan ekonomi mengalami *slack movement* positif, yang menandakan potensi peningkatan output untuk mendukung kinerja ekonomi daerah. Selanjutnya, pada tahun 2023 Kabupaten Luwu Timur kembali mencapai efisiensi penuh dengan seluruh variabel menunjukkan nilai *slack* dan *radial movement* nol, sehingga input dan output berada dalam kondisi optimal. Akan tetapi, pada tahun 2024 muncul kembali indikasi inefisiensi pada LRA, jumlah ASN, dan unit pelayanan publik, yang mengindikasikan adanya penggunaan input berlebih yang belum sepenuhnya efisien.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum kinerja pemerintah daerah di wilayah Luwu Raya telah mencapai tingkat efisiensi yang cukup tinggi berdasarkan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA). Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bamatraf & Prabowo (2024) yang juga menggunakan metode DEA dalam menilai efisiensi organisasi publik. Mereka menemukan bahwa DEA mampu mengidentifikasi penggunaan sumber daya yang tidak optimal dan menjadi alat yang efektif untuk perbaikan kinerja organisasi sektor publik. Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada fungsi DEA sebagai alat pengukuran objektif yang dapat menggambarkan tingkat efisiensi antar unit pemerintahan.

Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan Safitri (2023) yang meneliti efisiensi pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) antar daerah di Indonesia dengan metode DEA, di mana hasilnya menunjukkan bahwa tidak semua daerah memiliki tingkat efisiensi yang merata. Hal yang sama terlihat di Luwu Raya, khususnya pada Kabupaten Luwu Timur dan Luwu Utara yang efisiensinya masih berfluktuasi akibat belum optimalnya pemanfaatan input, seperti anggaran dan distribusi ASN.

Dari sisi audit kinerja, hasil penelitian ini mendukung temuan Setianingsih & Setyaningrum (2025) yang menegaskan bahwa pengawasan internal dan audit kinerja berkontribusi penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program pemerintah. Dalam konteks ini, penggunaan DEA sebagai alat evaluasi objektif dapat menjadi pelengkap audit kinerja karena menunjukkan secara kuantitatif hubungan antara input dan output pemerintah daerah.

Temuan penelitian ini juga relevan dengan hasil studi Yulitiawati & Rusmidarti (2021) yang menekankan bahwa pengukuran kinerja sektor publik perlu berlandaskan pada prinsip *Value for Money* (3E: Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas). Kabupaten Luwu yang konsisten efisien selama lima tahun mencerminkan penerapan prinsip tersebut, di mana setiap penggunaan anggaran publik menghasilkan output pembangunan secara maksimal tanpa pemborosan sumber daya. Sebaliknya, fluktuasi efisiensi di Kabupaten Luwu Timur memperlihatkan bahwa prinsip ekonomi dan efisiensi belum berjalan secara optimal.

Selain itu, penelitian ini memperkuat hasil studi Mattoasi et al. (2021) yang menyatakan bahwa kinerja pemerintah daerah sangat bergantung pada efektivitas sistem pengendalian internal

dan kemampuan aparatur dalam mengelola sumber daya publik. Daerah dengan pengawasan dan kapasitas aparatur yang lebih baik cenderung memiliki tingkat efisiensi lebih tinggi. Kondisi ini terlihat jelas pada Kota Palopo yang mampu meningkatkan efisiensi dari 0,844 pada 2020 menjadi 1,000 pada tahun-tahun berikutnya.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap literatur sebelumnya dengan menunjukkan bahwa pendekatan DEA tidak hanya dapat digunakan dalam sektor keuangan atau lembaga perbankan, tetapi juga relevan dalam konteks pemerintahan daerah. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi potensi inefisiensi, sekaligus menjadi dasar perencanaan kebijakan berbasis kinerja dan audit publik yang terukur.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) model CCR, dapat disimpulkan bahwa secara umum pemerintah daerah di wilayah Luwu Raya telah menunjukkan kinerja efisien dalam mengelola sumber daya publik selama periode 2020–2024. Kabupaten Luwu menjadi daerah paling konsisten dengan nilai efisiensi 1,000 selama lima tahun berturut-turut, menunjukkan pengelolaan anggaran dan aparatur yang optimal. Kota Palopo mengalami peningkatan dari kondisi tidak efisien pada tahun 2020 menjadi efisien penuh pada 2021–2024, menandakan perbaikan tata kelola keuangan dan sumber daya manusia. Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur menunjukkan fluktuasi efisiensi, terutama pada tahun 2023 dan 2024, akibat adanya ketidakseimbangan antara input dan output. Hasil ini menegaskan bahwa penerapan DEA dapat menjadi alat ukur objektif dalam audit kinerja pemerintah daerah, karena mampu menunjukkan sejauh mana penggunaan anggaran dan sumber daya telah sesuai dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas publik dalam kerangka value for money. Penelitian ini memperluas pemahaman terhadap konsep *value for money* dengan menegaskan bahwa efisiensi pengelolaan pemerintah daerah tidak hanya diukur melalui tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga melalui keterkaitan proporsional antara input dan output pembangunan yang dihasilkan. Secara konseptual, penelitian ini menawarkan kerangka evaluasi kinerja pemerintah daerah yang terukur dan dapat diintegrasikan ke dalam proses audit kinerja. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa penggunaan metode kuantitatif seperti DEA dapat menjadi instrumen pendukung yang kuat bagi auditor maupun pembuat kebijakan dalam menilai kinerja, mengidentifikasi potensi inefisiensi, serta merumuskan strategi perbaikan yang berbasis pada bukti empiris.

Saran

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur perlu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya, khususnya pada aspek penggunaan anggaran, distribusi ASN, serta efektivitas unit pelayanan publik, agar tercapai keseimbangan yang optimal antara input dan output. Sementara itu, Kota Palopo diharapkan dapat mempertahankan tingkat efisiensi yang telah diraih dengan memperkuat pengawasan anggaran dan menerapkan prinsip *value for money* secara konsisten. Kabupaten Luwu dapat dijadikan contoh dalam praktik pengelolaan sumber daya yang efisien dan akuntabel bagi daerah lain di wilayah Luwu Raya. Dalam konteks audit kinerja, lembaga pengawasan seperti BPK dan Inspektorat Daerah disarankan untuk memanfaatkan hasil analisis DEA sebagai alat bantu evaluasi kinerja, sehingga potensi inefisiensi dapat diidentifikasi secara objektif dan terukur. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menambahkan variabel seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat investasi, dan indikator pelayanan publik lainnya guna memperluas cakupan analisis efisiensi pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, F. Z., & Fadly, R. (2023). Pengaruh Audit Kinerja Sektor Publik dan Pengawasan Fungsional terhadap Akuntabilitas Publik pada Komisi Yudisial. *Journal on Education*, 06(01), 8979–8987.
- Bahasoan, A. N., Anwar, A. I., Lekas, M. N. J., & Asryad, R. (2024). Otonomi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Literature Review. *Ekonomis: Journal of Economics and*

- Business*, 8(1), 43. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1119>
- Bamatraf, L., & Prabowo, R. (2024). Pengukuran Kinerja Institusi dengan Pendekatan BSC (Balanced Scorecard) dan DEA (Data Envelope Analysis) Dalam Peningkatan Efisiensi Organisasi (Studi Kasus: Satuan Polisi Pamong Praja - Kabupaten Kampar, Provinsi Riau). *Nusantara of Engineering (NOE)*, 7(2), 150–159. <https://doi.org/10.29407/noe.v7i02.23000>
- Darmawan, A. D. (2024). *Statistik Persentase Penduduk Miskin di Kota Palopo 2015-2024*. Katadata Media Network.
- Fuad, L. (2023). Analisis Efisiensi dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA) pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah. *Jurnal Maneksi*, 12(2), 246–252. <https://doi.org/10.31959/jm.v12i2.1537>
- Hamdani, R., & Mayshelly, E. (2023). Kinerja Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016-2020. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 5(2019), 10–25. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art2>
- Handraini, H., Frinald, A., & Magriasti, L. (2024). Konsep Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Di Indonesia. *Jurnal Professional*, 11(2), 601–608.
- Mattoasi, M., Musue, D. P., & Rauf, Y. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jambura Accounting Review*, 2(2), 100–109. <https://doi.org/10.37905/jar.v2i2.34>
- Mualif, A., Jabbar, A., & Syarifuddin, H. (2024). Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Program Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 11(1), 30–39. <https://doi.org/10.56015/gjikplp.v11i1.259>
- Nairizi, M. A. (2023). Analisis Pengaruh Kemiskinan, Pengangguran, Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Jendela Inovasi Daerah*, 6(1), 38–58. <https://doi.org/10.56354/jendelainovasi.v6i1.131>
- Nursa F, Junaidin Z, & Hasbi. (2021). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Antar Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2019. *Tata Kelola*, 8(1), 1–35. <https://doi.org/10.52103/tatakelola.v8i1.453>
- Sabrina, R. (2022). Strategi Pembangunan Berkelanjutan di Era Otonomi Daerah Berbasis Partisipasi Masyarakat. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 22(1), 53–61. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v22i1.10200>
- Safitri, D. U. R. (2023). *Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Alokasi Umum Dalam Upaya Pemerataan Kemampuan Keuangan Antardaerah Di Indonesia Dengan Metode Data Envelopment Analysis (Dea)*.
- Sarjito, A. (2024). Efektivitas Kebijakan Sosial dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan dan Angka Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora*, 6(2), 1–12. <https://doi.org/10.36624/jisora.v6i2.90>
- Setianingsih, H., & Setyaningrum, D. (2025). Optimalisasi Kegiatan Pengawasan Intern Pemerintah: Evaluasi Penerapan Audit Kinerja. *Owner*, 9(1), 235–245. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i1.2391>
- Shintia, R. (2021). *Analisis tingkat efisiensi melalui pendekatan data envelopment analysis pada bank umum syariah di Indonesia*. <http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/7687/1/1740100289.pdf>
- Simanjuntak, G. Y., Yulika, M., Putri, D. N., & Pangestoeti, W. (2023). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Trisakti*,

3(2), 2309–2318.

- Sofyan, A., Tamtelahitu, J., & Nikijuluw, J. B. (2024). Systematic Literature Review: Konektivitas Sebagai Simpul Kemiskinan Daerah Kepulauan. *Equilibrium: Journal of Economics and Development Studies*, 2(1), 136–148. <https://doi.org/10.30598/equilibrium.2.1.136-148>
- Yulitiawati, Y., & Rusmidarti, R. (2021). Analisis Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik Dengan Menggunakan Pendekatan Value For Money Di Kabupaten OKU. *Jetap*, 91–109. <http://journal.unbara.ac.id/index.php/etap/article/view/966%0Ahttps://journal.unbara.ac.id/index.php/etap/article/download/966/640>
- Zanneta A. N, Sonny F.S, Tasya D. A, & Mochamad F.Y. (2024). Penerapan Strategi Value For Money (3E) dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Kota Jakarta Tahun 2022. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 3(3), 75–87. <https://doi.org/10.55606/jekombis.v3i3.3717>